

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan global dan tak kunjung usai, sebab kemiskinan merupakan fenomena yang hampir terjadi di seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang masih sangat sulit untuk diselesaikan. Padahal salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mengurangi tingkat kemiskinan.

Jika diuraikan satu persatu, jumlah faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan cukup banyak. Mulai dari tingkat laju pertumbuhan output atau produktivitas, tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, tingkat investasi, pajak dan subsidi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam di suatu wilayah, etos kerja dan motivasi kerja, kultur budaya atau tradisi, bencana alam hingga peperangan, politik dan lain-lain. Sudah banyak upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah sejak tiga dekade terakhir yaitu dengan program-program pembangunan pemerintah di antaranya dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan penyuluhan sanitasi dan program

lainnya. Terdapat 3 program pengentasan kemiskinan yang disoroti dalam era pemerintahan Joko Widodo.

Pertama, mengenai stabilitas harga kebutuhan pokok yang ada di masyarakat. Stabilitas harga pokok sangat memengaruhi daya beli masyarakat. Apabila harga pokok naik, artinya garis kemiskinan akan naik dan biaya hidup masyarakat miskin akan naik. Ini berarti kenaikan pendapatan penduduk miskin baik petani maupun buruh bangunan tidak berarti. Oleh sebab itu, kebijakan yang terkait dengan kenaikan harga kebutuhan pokok harus dikaji dan dikalkulasi secara matang.

Kedua, program-program yang ada di Kementerian Pertanian, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Program kedua diharapkan dapat menyalurkan dana desa yang menjangkau 40 persen penduduk lapisan terbawah, artinya program kementerian harus fokus pada peningkatan pendapatan dan daya beli mayoritas rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian formal maupun informal.

Ketiga, fokus program ketiga yaitu program-program bantuan sosial. Adapun bentuk program bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), serta program beras sejahtera yang diharapkan dapat disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu sehingga bisa meringankan beban hidup masyarakat miskin.

Semakin tingginya jumlah dan presentase penduduk miskin di suatu daerah tentu saja akan menjadi beban pembangunan, sehingga peran

pemerintah dalam mengatasinya pun akan semakin besar. Alokasi dana APBN/APBD untuk program-program pengentasan kemiskinan dapat dikatakan berhasil bila jumlah dan presentase penduduk miskin berkurang bahkan tidak ada. Namun, fakta yang ada mengindikasikan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan senantiasa menjadi hal yang perlu dicermati dan dikaji ulang khususnya dalam penyusunan dan penerapan strategi dan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah.

Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi. Persoalan kemiskinan menjadi salah satu kebijakan pembangunan di setiap negara. Untuk mengatasi kemiskinan diperlukan berbagai upaya pembangunan dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut (Denni Sulistio Mirza, 2012).

Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Pembangunan juga harus dilihat sebagai proses multidimensi yang mencakup tidak hanya pembangunan ekonomi, namun juga mencakup perubahan sosial, perilaku, dan kelembagaan. Tujuan utama pembangunan ekonomi selain berupaya untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, pembangunan harus pula berupaya untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat

pengangguran atau upaya untuk menciptakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah mengurangi jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat melaksanakan fungsi pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan otonomi daerah dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Aspek desentralisasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Prinsip Umum Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah pasal 279 ayat 1 yang berbunyi “Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. Hubungan Keuangan dalam penyelenggaraan pada ayat (1) meliputi : (a) pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah, (b) pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (c) pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang

ditetapkan dalam undang-undang dan, (d) pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal)”.

Kemiskinan yang menjadi salah satu masalah pembangunan di Indonesia membuat pemerintah harus berupaya untuk mengurangi kemiskinan dengan berbagai program dan pembiayaan. Salah satu upaya pembiayaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Pempus) ke Pemerintah Daerah (Pemda). Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, PAD berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

Selain dari PAD dan DAU pemerintah juga mengeluarkan dana untuk mengentaskan kemiskinan berupa dana dari Belanja Sosial. Berdasarkan Peraturan Presiden No.46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, dinyatakan bahwa “Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanggulangan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dan inklusivitas”.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per

kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara presentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 persen pada september 2017. Selama periode Maret 2017-September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sebanyak 401,28 ribu orang dari (10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi 10,27 orang pada September 2017), sementara di perdesaan berkurang sebanyak 786,95 ribu orang dari (17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31 juta orang pada September 2017). Meskipun angka kemiskinan berkurang selama tahun 2017, namun kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang tidak bisa dianggap remeh.

Pulau Jawa sebagai salah satu pulau yang memiliki 5 provinsi dan 113 kabupaten menjadi salah satu pulau dengan jumlah penduduk terbanyak dan menjadi salah satu pusat perekonomian yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu pusat perekonomian Indonesia, tidak menjamin bahwa permasalahan kemiskinan sudah terselesaikan.

Menurut data dari BPS dan data dari Kementrian Keuangan, jumlah penduduk miskin tertinggi yang ada di pulau Jawa terdapat di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.418.000 jiwa dengan PAD sebesar Rp375.531.165.351, DAU sebesar

Rp677.892.873.000, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp16.837.300.000. Jumlah penduduk miskin terendah di pulau Jawa berada di Kota Mojokerto sebanyak 7.280 jiwa dengan jumlah PAD sebesar Rp178.295.062.084 DAU sebesar Rp196.065.401.475, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3.191.760.000. Jika disandingkan dengan PAD, DAU, dan jumlah penduduk miskin yang berada di Kabupaten/Kota di Pulau Jawa tentunya akan sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh antara PAD, DAU, dan jumlah penduduk miskin terhadap Belanja Bantuan Sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil tema Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk Miskin terhadap Belanja Bantuan Sosial se-Pulau Jawa tahun 2017. Mengingat pulau Jawa sebagai salah satu pusat perekonomian terbesar di Indonesia, masih banyak penduduk miskin yang terdapat di pulau Jawa sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pengaruh belanja sosial yang dianggarkan oleh pemerintah daerah didalam membiayai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan Belanja Bantuan Sosial khususnya untuk menuntaskan jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten/Kota di pulau Jawa.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Bantuan Sosial se-Pulau Jawa Tahun 2017?

2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Bantuan Sosial se-Pulau Jawa Tahun 2017?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Belanja Bantuan Sosial se-Pulau Jawa Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah se-Pulau Jawa terhadap Belanja Bantuan Sosial tahun 2017
2. Mengidentifikasi pengaruh Dana Alokasi Umum se-Pulau Jawa terhadap Belanja Bantuan Sosial tahun 2017
3. Mengidentifikasi pengaruh Jumlah Penduduk Miskin se-Pulau Jawa terhadap Belanja Bantuan Sosial tahun 2017

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Ilmu pengetahuan diharapkan dapat mengembangkan teori yang sudah ada mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk Miskin terhadap Belanja Bantuan Sosial se-Pulau Jawa tahun 2017
2. Sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya

3. Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya khususnya penelitian pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk Miskin terhadap Belanja Bantuan Sosial di Pulau Jawa tahun 2017

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab pendahuluan berisi latar belakang penelitian, pokok rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kedua, tinjauan pustaka dan hipotesis penelitian. Tinjauan pustaka yang akan dibahas yaitu mengenai otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), kemiskinan, dan belanja bantuan sosial.

Ketiga, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas serta pengujian hipotesis.

Keempat, yaitu analisis dan pembahasan. Dalam bab analisis dan pembahasan dijelaskan mengenai deskripsi data. Deskripsi data berisi mengenai anggaran PAD, DAU, dan jumlah penduduk miskin serta anggaran belanja bantuan sosial yang disusun dalam bentuk tabel.

Bab terakhir yaitu penutup. Bab penutup berisi kesimpulan mengenai penelitian yang telah dilakukan. Bab ini juga berisi saran-saran dan kelemahan dari penelitian yang dilakukan.